



**INTERPRETASI PASAL 51 UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1999 DIKAITKAN KONFLIK KEPENTINGAN
MERGER BANK SYARIAH BUMN**

TESIS

**MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN
1910622034**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
2022**



**INTERPRETASI PASAL 51 UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1999 DIKAITKAN KONFLIK KEPENTINGAN
MERGER BANK SYARIAH BUMN**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN

1910622034

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Muhammad Rizky Ramadhan

NRP : 1910622034

Tanggal : 30 Juni 2022

Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 30 Juni 2022
Yang Menyatakan,



Handwritten signature of Muhammad Rizky Ramadhan.

(Muhammad Rizky Ramadhan)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rizky Ramadhan
NRP : 1910622034
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Interpretasi Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dikaitkan Konflik Kepentingan Merger Bank Syariah BUMN

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesissaya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Juni 2022

Yang menyatakan,



(Muhammad Rizky Ramadhan)

PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :
Nama : MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN
NRP : 1910622034
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tesis : Interpretasi Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 Dikaitkan Konflik Kepentingan Merger Bank
Syariah BUMN

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji serta telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.



Dr. Atik Winarti, S.H., M.H
Ketua Penguji



Dr. Imam Haryanto., S.H., M.H
Pembimbing



Prof. Dr. Arrisman, S.H., M.H
Penguji



Dr. H. Abdul Halim M. Ag
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Beniharmoni Harefa, SH., LL.M
Kepala Program Pendidikan

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian :

INTERPRETASI PASAL 51 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TERHADAP MERGER BANK SYARIAH BUMN

MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan interpretasi hukum atas Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap merger bank syariah BUMN yang mengecualikan badan usaha tertentu untuk melakukan monopoli dalam sektor badan usaha tertentu berdasarkan pendekatan *rule of reason*. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan tindakan merger 3 BUMN menjadi satu badan usaha milik negara yang bergerak dalam sektor perbankan syariah yang melebihi batas untuk melakukan merger. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa interpretasi secara restriktif atas Pasal 51 UU 5/1999 terhadap merger bank syariah BUMN melebihi batas yang diberikan oleh peraturan perundangan lainnya yaitu Pasal 28-29 UU 5/1999 *jo.* PP 57/2010, tetapi dikecualikan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 51 UU 5/1999. Adapun penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Kesimpulan ditarik berdasarkan asas kepastian hukum dan teori penafsiran hukum, bahwa Pasal 51 UU 5/1999 memberikan pengecualian terhadap tindakan yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan monopoli atas badan usaha tertentu berdasarkan pendekatan *rule of reason*.

Kata Kunci : Penafsiran Hukum, Persaingan Usaha, Penggabungan

Abstract

This study was conducted to describe the legal interpretation of Article 51 of Law Number 5 of 1999 on the merger of state-owned Islamic banks which exclusivity of certain business enterprises to conduct monopoly practices in certain business sectors based on the rule of reason approach. This writing is motivated by the act of mergers of 3 SOEs into one state-owned enterprise engaged in the Islamic banking sector which exceeds the threshold for conducting a merger. The results of the study reveal that the restrictive interpretation of Article 51 of Law 5/1999 on the merger of SOE Islamic banks exceeds the limit provided by other laws and regulations, which is stated in Articles 28-29 of Law 5/1999 juncto. PP 57/2010, but is excluded as stated in Article 51 of Law 5/1999. This research was carried out in a normative juridical manner, with a legal approach and a conceptual approach. The conclusion is drawn based on the principle of legal certainty and the theory of legal interpretation, with the result that Article 51 of Law 5/1999 provides exceptions to actions that cause unfair competition and monopoly over certain business entities based on a rule of reason approach.

Keyword : Legal Interpretation, Competition, Merger

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga tesis ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ini yang dilaksanakan sejak Maret 2021 ini adalah "**Interpretasi Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dikaitkan Konflik Kepentingan Merger Bank Syariah BUMN.**"

Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta serta mencapai gelar Magister Hukum periode tahun 2022. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan tesis ini, antara lain:

1. Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Dr. H. Abdul Halim, M. Ag Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LLM Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Dr. Imam Haryanto, S.H., M.H Selaku Pembimbing Penulis Yang Telah Bersedia Memberikan Bimbingan Dalam Penulisan Tesis Ini;
5. Bapak dan Ibu dosen, Civitas Akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
6. Orang tua saya, Ibunda Jenny Chairani dan Ayahanda Eman Legantoro yang selalu memberikan doa dan semangat kepada saya;
7. Anastasia Ananda Aries Putri sebagai penyemangat moral dalam penyelesaian tesis ini;
8. Teman-teman seperjuangan di Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;

9. Semua pihak, sahabat serta rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan. Kritik dan saran serta tanggapan yang bersifat membangun akan penulis terima demi kesempurnaan skripsi ini.

Tangerang, 30 Juni 2022

Penulis

(Muhammad Rizky Ramadhan)

DAFTAR ISI

HALAM SAMPUL	i
PERNYATAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Kerangka Teori & Kerangka Konseptual	6
1.6. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP PENGECUALIAN LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM BIDANG USAHA PERBANKAN SYARIAH	10
II.1 Penafsiran Hukum	10
II.2 Penggabungan (Merger)	19
II.2.1 Restrukturisasi	23
II.2.2 Merger Dalam Industri Perbankan	26
II.3. Persaingan Usaha.....	29
II.3.1 Definisi Persaingan Usaha.....	29
II.3.2 Materi Esensial Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	33
II.3.3 Perjanjian-Perjanjian Yang Merugikan Persaingan Yang Dilarang Oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	34
II.3.4 Kegiatan yang Dilarang yang Menghambat Persaingan	36
II.4 Monopoli	37
II.5 Prinsip <i>Per Se Illegal</i> dan <i>Rule of Reason</i>	42
II.6 Konflik Kepentingan	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	56
A. Jenis Penelitian	56
B. Pendekatan Penelitian.....	57

C.	Sumber Data	57
D.	Teknik Analisis Data	59
BAB IV	ANALISIS TERHADAP INTERPRETASI PASAL 51 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 DIKAITKAN KONFLIK KEPENTINGAN MERGER BANK SYARIAH BUMN	60
IV.1.	Interpretasi Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dikaitkan Merger Bank Syariah BUMN.....	60
IV.2	Analisis Konflik Kepentingan antara Badan Usaha Milik Negara dengan masyarakat umum berdasarkan asas kepastian hukum.	65
BAB V	PENUTUP.....	75
V.1	Kesimpulan.....	75
V.2	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA		78
RIWAYAT HIDUP		